

USAHA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PASURUAN PROPINSI JAWA TIMUR

Zulifah Chikmawati

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nadlatul Ulama Sidoarjo

Email: hikmawatizulifah@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, multidimensi dan tidak dapat dengan mudah dilihat dari hanya angka absolut. luas dan menyebabkan sejumlah besar kondisi budaya dan masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menjadi sangat beragam. Penelitian mengambil lokasi yang disengaja (purposive) di Pasuruan, karena ia termasuk dalam tipologi wilayah pesisir, sehingga penelitian ini diharapkan untuk mengetahui kondisi kemiskinan di wilayah pesisir. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel FGD di tingkat pemerintah daerah, dan diikuti oleh semua instansi dan FGD di tingkat masyarakat (konsultasi masyarakat), dan FGD diadakan di panggung desa Rejo dan Desa Kabupaten Tuban Sekargading Bugul District Selatan. Kendala yang dialami oleh Pemerintah WordPress, karena program pencegahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih belum dapat dinikmati oleh banyak atau mayoritas masyarakat, program penanggulangan kemiskinan di Pasuruan masih tumpang tindih. Ini tidak maksimal karena peran TKPKD dalam melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penanggulangan program kemiskinan.

Kata-kata Kunci: koordinasi, penanggulangan kemiskinan

Abstract

Poverty is a complex phenomenon, multidimensional and can not be easily viewed from an only absolute numbers. Wide area and causing a big variety of cultural conditions and problems of poverty in the province of East Java become very diverse. The Research was taking a deliberate location (purposive) in Pasuruan, because it was included in the typology of the coastal region, so the research was expected to determine the condition of poverty in coastal areas. The research used sampling methods FGD at regional government level, and followed by all agencies and FGDs at community level (community consultation), and FGD was held on the stage Rejo village and the village of Tuban district Sekargading Bugul South District. Constraints experienced by the Government of WordPress, was because prevention programs are implemented by local governments still can not be enjoyed by many or the majority of society, poverty reduction programs in Pasuruan still overlap. This was not optimal because of TKPKD role in implementing the synchronization and coordination of programs poverty reduction.

Keywords: coordination , poverty reduction

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh, upaya penanggulangan kemiskinan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara. Kemiskinan

merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat dengan mudah dilihat dari suatu angka absolut saja. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di provinsi Jawa Timur menjadi sangat beragam.

Masyarakat miskin pada umumnya ditandai dengan ketidak berdayaan dan ketidak mampuan dalam hal : (1) memenuhi kebutuhan – kebutuhan (hak-hak) dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan *basic need* dalam kehidupan, (2) melakukan kegiatan produktif (*unproductiveness*) (3) menjangkau akses sosial dan ekonomi (*inaccessibility*), (4) menentukan nasibnya sendiri dan selalu mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan serta sikap apatis dan fatalistik (*vulnerability*) dan (5) senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom pro poor*) seperti yang dikemukakan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPM).

Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh juri JPIP (The Jawa Post Institute of Pro Otonomi) menunjukkan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah hanya mampu efektif 9,8 % menanggulangi kemiskinan, angka ini relatif kecil untuk menanggulangi kemiskinan, oleh sebab itu perlu dievaluasi upaya dan kendala penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan kemiskinan dan mengetahui kendala penanggulangan kemiskinan.

Kerangka Teori

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui

berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Untuk mencapai masyarakat sejahtera, demokratis dan berkeadilan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor pedesaan dan pertanian.

Daerah pedesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian pedesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Karakteristik

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan pendekatan partisipatif
Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
- c. Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.
- d. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan
Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Cakupan

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Wilayah
Kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.
- b. Sektor
Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin

dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah.

Penerima Manfaat

Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.

Kebijakan Pokok Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan Peraturan Presiden no. 166 tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim ini merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional yang akan melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku untuk memastikan agar pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga dapat terlaksana sesuai rencana. Untuk itu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menetapkan kebijakan pokok berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan meliputi (a) kebijakan dalam hal penetapan sasaran (*targeting*) dengan menggunakan metode dan daftar rumah tangga sasaran yang sama untuk semua program bantuan sosial; (b) kebijakan berkaitan dengan rancangan program agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan; (c) kebijakan berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan program agar efisien dan efektif; (d) melaksanakan monitoring dan evaluasi agar dampak dari program penanggulangan kemiskinan dapat cepat diketahui dan ditindaklanjuti.

Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya (a) memperbaiki program perlindungan sosial; (b) meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; (c) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta (d) menciptakan pembangunan yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengambil lokasi secara sengaja di Kabupaten Pasuruan, dipilih Kabupaten Pasuruan karena kabupaten Pasuruan adalah wilayah pesisir, sehingga dapat diketahui kondisi kemiskinan di wilayah pesisir. Konsultasi komunitas dilaksanakan pada kelurahan panggung rejo kecamatan Tuban dan Desa Sekargading Kecamatan Bugul Kidul. Analisis data menggunakan analisis diskriptif, yakni menguraikan hasil penelitian dengan diperjelas oleh tabel dan gambar. Dengan menggunakan metode pengambilan data, *Focus Grup Discussion* (FGD) pada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pengambilan data di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan pada pertemuan SKPD atau Dinas di Kantor Walikota Pasuruan.

Sekretaris TKPKD menyampaikan materi terlebih dahulu dan ditindak lanjuti dengan FGD. Pengambilan responden dilaksanakan secara sengaja, di tingkat Pemerintah daerah dan ditingkat masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Presiden No 166 Tahun 2014, Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka semua kota/kabupaten berupaya untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Kabupaten Pasuruan juga berupaya menaggulangi kemiskinan dengan berbagai upaya, secara umum kondisi wilayah , keadaan penduduk dan penduduk miskinnya adalah sebagai berikut, Luas Wilayah Kota Pasuruan : 36,52 Km², Terdiri dari 3 kecamatan dan 34 kelurahan, Jumlah Penduduk : 186.322 jiwa (Tahun 2010), Laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,02%, Pendapatan perkapita penduduk Kota Pasuruan atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010 sebesar Rp. 6.468.203,-, sedangkan berdasarkan ADHB sebesar Rp. 15.118.654,-, IPM 72,97.

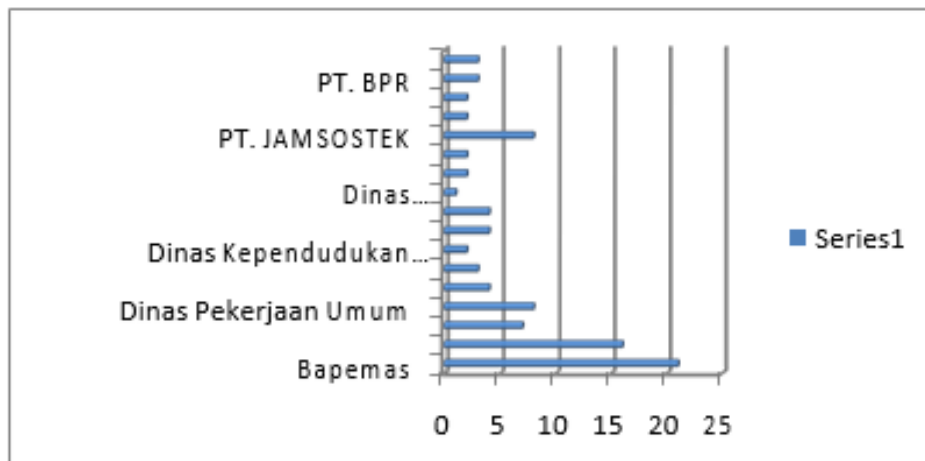
Pada Tahun 2010, Angkatan Kerja: 10.631 Jiwa, Tingkat Pengangguran Terbuka: 11,23% (dari Jumlah Penduduk), Tingkat Pertumbuhan Ekonomi: 5,66% per Tahun, Struktur perekonomian didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, restoran dan industri pengolahan, Jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS Kota Pasuruan (PPLS tahun 2008) pada tahun 2008 adalah 9.009 RTM (30.176 ARTM) dengan rincian sebagai berikut: Rumah Tangga Sangat Miskin: 1.293 RTM (14,35 %), Rumah Tangga Miskin : 3.252 RTM (36,10 %), Rumah Tangga hampir Miskin: 4.464 RTM (49,55 %). Arah Pengentasan kemiskinan Kabupaten Pasuruan adalah: Pengurangan dan pengentasan kemiskinan dalam upaya Pencapaian MDGs, Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dalam Kerangka Pembangunan Manusia (*Human Development*).

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan: Meningkatnya program penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan prakarsa dan keragaman lokal, dengan menempatkan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial; Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan; serta Tersedianya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang bermutu bagi penduduk miskin.

Anggaran dan jumlah kegiatan pada upaya penggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

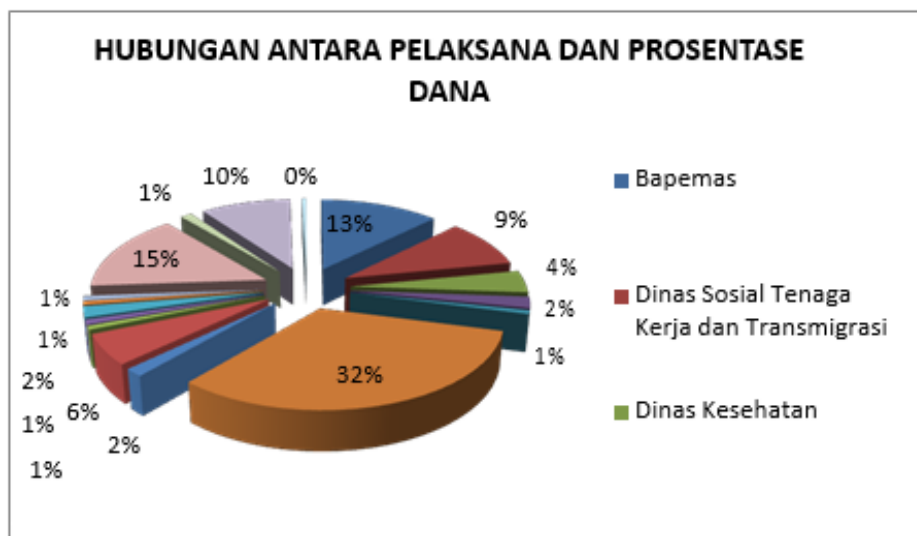
No	Instansi Pelaksana	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Prosentase (%)
1	Bapemas	21	5.293.022.000	12,59
2	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16	3.913.100.000	9,30
3	Dinas Kesehatan	7	1.778.341.476	4,23
4	Dinas Pekerjaan Umum	8	903.999.500	2,15
5	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	4	1.305.691.500	0,73
6	Dinas Pendidikan	3	13.633.830.000	32,42
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2	632.749.000	1,50
8	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Peternakan	4	2.443.486.819	5,81
9	Kantor Ketahanan Pangan	4	299.000.000	0,71
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	388.800.000	0,92
11	Diskoperindag	2	880.000.000	2,09
12	PT. ASKES	2	235.000.000	0,56
13	PT. JAMSOSTEK	8	357.800.000	0,85
14	Bank BRI	2	6.300.000.000	14,98
15	Bank Jatim	2	500.000.000	1,19
16	PT. BPR	3	4.009.000.000	9,53
17	PDAM	3	182.933.000	0,43
Jumlah			42.056.753.295.295	100

Gambar 1. Anggaran dan jumlah kegiatan pada upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur



Gambar 2. Jumlah anggaran dan kegiatan dinas di Kabupaten Pasuruan

Dari gambar terlihat bahwa bahwa Bappemas memiliki kegiatan yang paling banyak daripada Dinas lainnya, yakni 21 kegiatan, selanjutnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16 kegiatan dan Jamsostek serta PU cipta karya 8 Kegiatan.



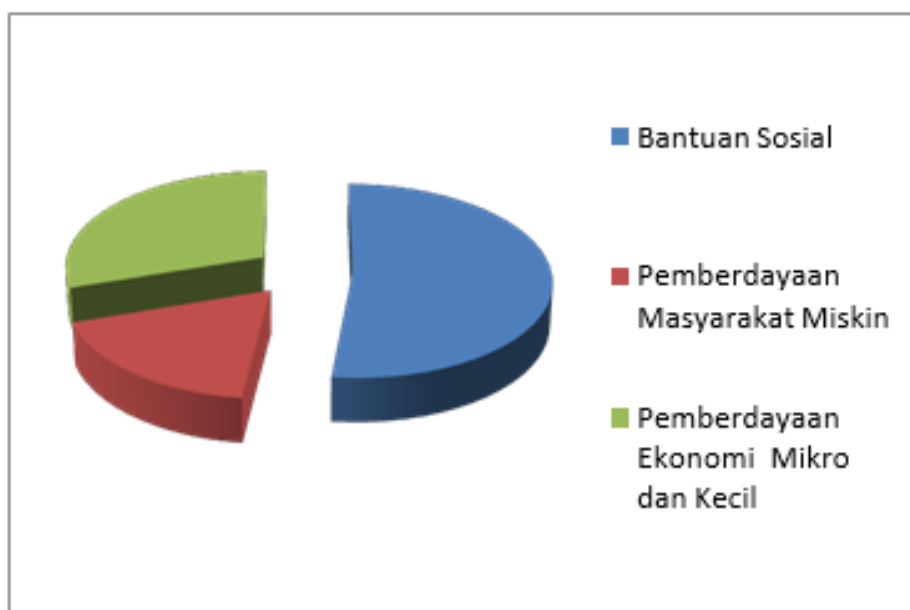
Gambar 3. Gambar hubungan antara pelaksana dan prosentase dana

Kalau BAPPEMAS Melaksanakan kegiatan paling banyak ternyata untuk alokasi dana lebih banyak pada Dinas Pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan tetap menyerap dana APBD terbesar di Kabupaten Pasuruan. Padahal dilapangan masih banyak keluhan masyarakat tentang biaya sekolah, biaya sekolah dibutuhkan untuk biaya seragam, membeli LKS (Lembar Kegiatan Siswa), uang makan, dan dana yang paling besar adalah uang pangkal, atau uang masuk siswa diawal sekolah.

Dana yang dipakai oleh Dinas Pendidikan memang relatif besar, tetapi dana yang ada pada Dinas Pendidikan banyak digunakan untuk membayar guru, membangun Infrastruktur sekolah, dan

Tabel 1. Program dan anggaran APBD Kabupaten Pasuruan

No	Kelompok Program	Anggaran (Rp,-)	Prosentase (%)
1.	Bantuan Sosial	21.262.605.976	50,56
2.	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	7.370.997.910	17,53
3.	Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil	12.347.893.909	29,36
4.	Lain-Lain	1.075.255.500	2,56
Jumlah		42.056.753.295.295	100



Gambar 4. Kelompok program penanggulangan kemiskinan dan pendanaan dari APBD Kabupaten Pasuruan

Dari gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa ternyata dana APBD Kabupaten Pasuruan yang digunakan untuk mendanai penanggulangan kemiskinan adalah banyak atau mayoritas untuk kegiatan bantuan sosial. Bantuan sosial ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsentrasi pada penyelesaian penanggulangan kemiskinan pada rumah tangga sangat miskin, padahal rumah tangga sangat miskin jumlahnya hanya (14,35%), dibandingkan dengan Rumah tangga miskin (36,10%) dan rumah

tangga hampir miskin sebesar (49,55%). Oleh sebab itu sebaiknya Pemerintah Daerah Pasuruan dapat bekerjasama dengan CSR Perusahaan Perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah daerah dapat mendanai rumah tangga miskin dari Program nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perkotaan dan pedesaan serta untuk masyarakat hampir miskin.

Kendala Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pasuruan

Kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, adalah program penanggulangan yang dilaksanakan oleh kabupaten Pasuruan masih belum dapat dinikmati oleh banyak atau mayoritas masyarakat, kendala yang dialami oleh Kabupaten pasuruan adalah masih tumpang tindihnya program.

Tabel 2. Kendala dan saran penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pasuruan

KENDALA	SARAN
Masyarakat awam pada kemiskinan , sehingga semua meminta BLT	
Pendataan kemiskinan menggunakan orang yang hanya di Coach/ dikursus 1 hari lalu mengambil data kemiskinan jelas akan bias	
Kemiskinan adalah Masalah yang komplek, sedangkan TKPKD adalah gabungan dari personil SKPD yang telah memiliki kesibukan sendiri sendiri	Mengapa tidak dibentuk badan penanggulangan kemiskinan, seperti Badan Penaggulangan banjir, Badan Narkotika Nasional

Kendala yang dialami oleh Kabupaten Pasuruan adalah kurangnya pengertian masyarakat yang relatif cukup atau tidak pada kategori miskin, karena masyarakat ini masih meminta bagian dari bantuan, padahal bantuan untuk masyarakat miskin tidak mencukupi, contohnya raskin (Beras miskin) yang dibagi juga pada masyarakat yang tidak kategori miskin, maka masyarakat miskin hanya dapat 4,5 dan terbanyak adalah 7,5 kilo, padahal sebetulnya dapat 15 kilo.

Karena data dari BPS kurang dapat menggambarkan kondisi masyarakat miskin yang sebenarnya, maka digunakan orang orang yang hanya di kursus 1 hari saja, maha data yang didapatkan juga bias. Belum optimalnya peran dari TKPKD, karena alasan sibuk, maka upaya sinkronisasi dan koordinasi belum dapat berjalan dengan baik.

Tabel 3. Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasuruan

No	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	PELAKSANA	JUMLAH BANTUAN
	Gerdutaskin		
	Kopwan	Dinas koperasi	
	Program Usaha garam Rakyat (PUGAR)	PNPM Kelautan	
	PNPM MP		
	Raskin		4,5-5 kilo
	Ketahanan pangan (Mandiri pangan)	Ketahanan pangan	

Program Penanggulangan kemiskinan yang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan luas adalah program penanggulangan kemiskinan dari dana pusat dan dana Provinsi Jawa timur. Seperti Program PUGAR, PNPM MP, Raskin dan Mandiri Pangan, Program Provinsi Jawa Timur adalah Gerdutaskin dan KOPWAN. Hal ini menandakan bahwa Program yang mampu memberikan manfaat pada relatif banyak masyarakat adalah program yang didanai oleh pusat dan Provinsi Jawa Timur.

Program yang didanai APBD Kabupaten Pasuruan masih belum nampak manfaatnya bagi kebanyakan masyarakat, hal ini dikarenakan APBD yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan relatif kecil, karena APBD banyak dialokasikan untuk belanja tidak langsung yakni untuk gaji PNS, selanjutnya untuk pendanaan program program yang tidak untuk khusus penanggulangan kemiskinan, hal lain yang menyebabkan anggaran untuk kemiskinan tidak signifikan menyelesaikan masalah kemiskinan adalah karena belum ada koordinasi antara pelaksana program (dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat daerah atau disingkat SKPD/ Dinas yang melaksanakan program).

Tabel 4. Pemenuhan Hak Dasar Pada Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pasuruan

No	Pendidikan	Kesehatan	Pangan	Perumahan	Lapangan Pekerjaan dan berusaha
1	BOS SD	Rawat inap gizi buruk	Aksi Mandiri Pangan Tahun 2011 di Kelurahan Kebonagung (**)	RTLH dari bank jatim	bantuan peralatan
2	BOS SMP	Katarak	Aksi desa Mandiri Pangan Tahun 2011 di Kelurahan Sekargadung (**)	CSR Rumah tidak layak huni	PUGAR (Program Usaha Garam Rakyat)
3	Bantuan Pendidikan untuk Kelg Miskin	layanan gangguan jiwa	Bansos Penanganan daerah rawan pangan (PDRP)		PAKET
4	PKH	Surat keterangan orang miskin			bantuan tenda untuk PKL
5		Papsmer			KOPWAN
6					Program Gema Sejahtera (EX Gerdu Taskin)

Pada pemenuhan hak dasar yang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, ditemui bahwa hak dasar akan akses tanah, hak dasar SDM dan lingkungan hidup, Hak dasar rasa aman, hak berpartisipasi. Hak akan keadilan dan kesetaraan gender dan hak atas sanitasi dan air bersih belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan Pemerintah pusat sendiri belum mengharuskan pemenuhan 11 hak dasar tersebut, hak yang masih menjadi prioritas bagi Pemerintah Pusat dan daerah untuk dipenuhi adalah hak akan pangan, papan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan.

Tetapi merujuk pada Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang merupakan produk dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) maka pemenuhan hak dasar tersebut harus dilaksanakan, karena hak dasar adalah hak yang melekat pada manusia, hak asasi manusia, manusia dikatakan sebagai manusia seutuhnya apabila terpenuhi minimal 11 hak dasar tersebut. Maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan Wajib untuk memenuhi 11 hak dasar pada masyarakat, terutama masyarakat miskin.

KESIMPULAN

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten pasuruan adalah , Meningkatkan program penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan prakarsa dan keragaman lokal, menempatkan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial; menurunkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; menurunkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan; serta tersedianya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang bermutu bagi penduduk miskin. Kabupaten Pasuruan perlu memiliki kendala yakni meningkatkan tugas pokok dan fungsi dari TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sehingga belum dapat melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan belum optimal dalam memenuhi 11 hak dasar yang ada di Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Alokasi anggaran pada ketiga cluster kelompok program belum berimbang. Alangkah baiknya apabila alokasi distribusi pendanaan pada cluster kelompok program dapat berimbang mengingat prosentase masyarakat sangat miskin (14,35%) relatif kecil dibanding dengan prosentase masyarakat miskin dan masyarakat agak miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, G., 2007. *Panduan Advokasi Strategi Penanggulangan*. Jakarta: GAPRI.
- Anon., 2007. *Panduan Operasional P2TPD, Vol. 5, Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan*. Jakarta: s.n.
- Arus, J. D. M., 2008. *Panduan Kaji Ulang Kebijakan*. Jakarta: GAPRI.
- Bereiter, C., 2002. *Education and Mind in The Knowledge Age*. New York: Erlbaum, Hillsdale.
- Ferry, Brian & Kiggins, 1999. *Making Use of a Knowledge Building Community to Develop Professional Socialization*. s.l.:University of Wollongong.
- Saefullah, B. Y., 2003. *Pengorganisasian Rakyat*. Jakarta: INCIS.
- Sumarsono, S., n.d. *Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan, Makalah Pelatihan*. Jakarta: PNPM MP.
- Supartono, 2007. *Panduan Kajian Kemiskinan Partisipatif (Participatory Poverty Assesment)*. Jakarta: GAPRI.
- Topatimasang, R., 2000. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Insist.